

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Muis, 2021, *Pemberantasan Korupsi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2017, *Legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” Cetakan pertama, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta.

Chairul Huda, 2015, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Chitraning Whidhianindy, 2013, *Analisis Hukum Upaya Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, *”Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aset Negara”* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Marwan Mas , 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Mataram.

Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Kompas, Jakarta.

Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni*, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, Raja grafindo persada, Jakarta.

Syaodih Sukmadinata dalam Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Filsafat, Teori, dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Widodo, 2019, *Metode Penelitian; Populer & Praktis*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yunus Husein, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.



Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang
Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

United Nations Convention Against Corruption 2003

C. Jurnal

Abd Razak Musahib 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak
Pidana Korupsi. Katalogis, Vol. 3 no.1, 2015.

Badra Fahrizal, Zainal Arifin Hoesein, 2026, *Studi Komparasi Non Conviction
Based Asset Forfeiture Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika
Serikat*, Journal of Innovative and Creativity, Volume 6 Nomor 1, 2026

Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar, Exal Sinaga dan Irwan Triadi,
2025 “*Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Sanksi
Hukum Baru Yang Efektif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi*

Tanpa Perlu Adanya Pemidanaan” Integrative Perspectives of Social and Science Journal, Vol. 2, No. 2.2025.

Davit Scott Romantz, 2018, *Civil Forfeiture And The Constituitions: A Legislative Abrogation Of The Right And The Judicial Response*.2018.

Dudy Sriyono, 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berdasarkan Hasil Sidang Lapangan (Descente) Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmbi Dan Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn.), *Unes Law Review* Vol.3 No,4, 2021.

Efrata Hamonangan Sinaga, 2025, *Analisis Dampak Kebijakan Ruu Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur*, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Volume 5, No. 1, 2025.

Guntur Rambey, 2016, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016.

Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra, 2021, Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, *Journal of Islamic Law* Vol.5 No.2, 2021

Hutmi Amivia Ilma. 2025. “Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* Volume 3 Nomor 1, 2025.

- Ica Karina, 2025, Proses Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jurnal Hukum Fiat Justitia vol.5 No.2, 2025.
- Imelda F.K. Bureni, 2016, *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 4, 2016
- Insan Kamil, Fajar Maulana Uce, 2024, *Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal ilmiah ilmu hukum simbur cahaya, Volume 31 Nomor 2, 2024
- Jack Tomlin *Et. Al.*, 2024, *Mandatory substance use treatment for justice-involved persons in Germany: a systematic review of reoffending, treatment and the recurrence of substance use outcomes*. Journal of Frontiers in Psychiatry Volume 14, 2024.
- Jamin Ginting, 2011, *“Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3.
- Jemmy Jefry Pietersz, 2018, *Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang*, Jurnal SASI 23, Vol.23 No. 2.
- Josephine Rachelle Parulina, Nuswantoro Dwiwarno, dan Darminto Hartono Paulus, 2023, Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 12. No. 1, 2023.

July Wiarti, 2017, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum*, UIR Law Review No. 1, 2017

Kevin Sulistyo Kaban, dan Abdul Kholiq, 2025, "*Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan.*" Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian 4, vol 5, 2025.

Lulu Mufidah, 2021, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 9 No.2, 2021.

Marfuatul Latifah, 2015, "*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia*". Jurnal Negara Hukum: Vol. 6, No. 1, 2015.

Masagus Rizki Aldino, Emilia Susanti, 2025, "*The Urgency Of Regulation Of Non Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia*". Jurnal Hukum Sehasen Volume 11 Nomor. 1, 2025.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: LP3S, 1998). Hlm. 127 dikutip dalam Kemenkumham, *Naskah Akademik RUU Perampasan Aset 2023*, Jakarta, 2023.

Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, dan Itok Dwi Kurniawan, 2024, *Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture, UNES Law Review, Volume 7 Nomor. 1, 2024.*

- Nani Mulyati dan Aria Zurnetti, 2022, *Asset Recovery as a Fundamental Principal in Law Enforcement of Corruption by Corporation*, Journal on Andalas International Journal of Socio Humanities, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia, 2022, " *Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia*" Jurnal Muhammadiyah Law Review 6 Nomor 1, 2022
- Refki Saputra, 2017, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non- Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Integritas, Volume 3 Nomor 1, 2017
- Ruli Supriati, Diah Aryani, dan Siti Maesaroh, 2017, " *Asset Management Using a Web-Based Accounting Online System To Maintain Value of Company Assets*" *APTISI Transactions on Management* Volume 1 Nomor 1, 2017.
- Ryniewicz-Lach, Elżbieta, 2024, *Improving asset confiscation: in the quest for effective and just solutions.*" *ERA Forum* Volume 25, 2024.
- Sindi Audia, 2025, *Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesia. Nationally Accredited Journal*, Volume 1 Nomor 1, 2025.
- Sudarto dan Hari Purwadi, 2017, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non- Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol 5 No. 1, 2017.

- Tantimin, 2023, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 5, no. 1, 2023.
- Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, dan Chairul Bariah, 2021, *Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kajian Hukum Juris Studia, Vol.2 No.1, 2021.
- Thio Faresha Adhithia, Ismunarno, 2025, *Perampasan Aset Tanpa Pidana (Komparasi Negara Indonesia Dan Australia)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Volume 14 No. 3, 2025.
- Tri Indah Sakinah, Benny Sumardiana, 2025, Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pidana Melalui Gugatan In Rem Berdasarkan Pendekatan Economic Analysis of Law, jurnal Reformasi Hukum, Volume 29 Nomor 1, 2025.
- Tsalis Abida Nurdin, 2024, *Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Nonconviction Based Asset Forfeiture*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 13, No. 2. 2024.
- Yanuar Ramadhana Fadhila, 2025, *Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Jurnal Usm Law Review 8.3, 2025
- Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati 2023, *Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaanya*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023

Zainab Ompu Jainah. 2022, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Journal of Rural and Development* Volume 3 Nomor 2, 2022.

Zaiton Hamin, *Et. Al*, 2025, *The Legal Framework of Asset Forfeiture for Money Laundering in the United Kingdom and Malaysia, International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 2025

D. Skripsi

Helmi, 2018, “*Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang Sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset*” Thesis Universitas Airlangga, Surabaya.

M.A. AKBAR, 2024, “*Abuse Of Power Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*” Skripsi Sarjana Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

M Taufik Hidayatullah, 2025, *Konsep Perampasan Aset Dan Perluasan Pada Rancangan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Restoratif*, Skripsi Sarjana Universitas Nusa Putra, Sukabumi.

E. Internet

A. Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam tindak Pidana Korupsi*
,<http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2026 pukul 10.37 WIB.

Anti Korupsi, “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022”, 20 Februari 2023,

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf> dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2026 pukul 10.44

DJKN Kemenkeu, “ *Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme*

Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia – Thailand,

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html)

[yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html) Diakses pada

21 Desember 2025 pukul 20.32 WIB

<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html>. diakses pada tanggal 28 November 2025 pukul 10.33 WIB

Kompas, “ *ICW: Ada 364 Kasus Korupsi Sepanjang 2024, Kerugian Negara Rp 279,9*

Triliun” <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/18091761/icw-ada-364-kasus-korupsi-sepanjang-2024-kerugian-negara-rp-2799-triliun>. diakses pada tanggal 17 November 2025 Pukul 09.32 WIB.

KPK, “Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun” <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>

OSCE, 2017. Crime should not pay! Police experts discuss ways to disrupt criminal activities at annual OSCE meeting.

<https://www.osce.org/secretariat/345961> diakses pada 1 Mei 2026 pukul 20.11

Saldi Isra, Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama

Internasional, <http://www.saldiisra.web.id/> diakses pada tanggal 2 Mei 2026 Pukul 11.42 WIB.

